

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL**

Oleh  
**M. Zikri**

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ, khususnya Pasal 158, bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan seluruh Perusahaan Otobus selanjutnya disingkat PO, telah memperkenalkan moda transportasi massal yang diharapkan mampu mengatasi masalah transportasi yaitu Bus Rapid Transit Trans Bandar Lampung. Pemerintah berusaha mendukung adanya usaha mewujudkan transportasi *massal* yang memadai di wilayah perkotaan dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi (Monev) tentang sistem angkutan umum massal di perkotaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal dan apa faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, mensistemisasikan, menilai dan menginterpretasikan hasil penelitian lapangan berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku yang mengatur tentang peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal.

Hasil penelitian didapatkan data bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sangat berperan dalam mewujudkan pelayanan angkutan kota/angkutan umum yang baik bagi kesejahteraan masyarakat atau bagi kepentingan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal yang difokuskan pada pelaksanaan BRT Trans Bandar Lampung di kota Bandar Lampung, selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal yang efektif di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan system angkutan umum missal yang efektif di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung adalah adanya tarik-ulur yang dilakukan oleh perusahaan yang

ditunjuk dalam pembangunan halte BRT, prasarana dan fasilitas perhubungan masih sangat minim dan banyak terdapat fasilitas perhubungan yang mengalami kerusakan dan perbandingan antara kemampuan penambahan ruas jalan dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung terlihat tidak seimbang.

Saran kepada pihak-pihak yang terkait didalam proses penataan transportasi publik darat di Kota Bandar Lampung sebagai berikut: Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mempertimbangkan kembali kerja sama dengan CV Devis Jaya dalam pembangunan halte dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain, selain itu agar meninjau kembali kebijakan memberikan izin pembangunan halte di atas trotoar yang menurut undang-undang adalah hak pejalalan kaki. Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat pembagian jalur atau jalan yang dilalui kendaraan umum menjadi berbeda dengan jalur yang dilalui oleh Bus Trans Bandar Lampung sehingga mengurangi penumpukan kendaraan di jalur tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, serta memberikan sosialisasi agar penggunaanya dialihkan dan beralih untuk lebih memilih menggunakan kendaraan umum dalam pelaksanaan aktivitasnya.

## ABSTRACT

### **ROLE OF BANDAR LAMPUNG'S TRANSPORTATION DEPARTMENT IN THE GENERAL MASS SYSTEM IMPLEMENTATION**

by  
M. Zikri

Law of the Republic of Indonesia No 22 of 2009 on the Road Transportation Traffic then LLAJ abbreviated, especially Article 158, that the governments ensure the availability of road-based mass transit to meet the transport needs of people with common motor vehicles in urban areas. Based on the city government of Bandar Lampung in cooperation with the entire company Autobus then abbreviated PO, has introduced a mode of mass transportation are expected to solve the transportation problem is Bus Rapid Trans Transit Bandar Lampung. The government tried to support the effort to realize an adequate mass transportation in urban areas by monitoring and evaluation (M & E) of the mass public transit systems in urban areas. Problems in this study is how the role of Bandar Lampung's Transportation Department in the general mass system implementation and what the limiting factor in the implementation role of Bandar Lampung's Transportation Department in the general mass system implementation.

Analysis of the data used in this study is a qualitative analysis, by way of outlining, systemized, assess and interpret the results of field research based on the legal system governing role of Bandar Lampung's Transportation Department in the general mass system implementation.

The study obtained data that the Bandar Lampung's Transportation Department was instrumental in realizing the city transport service/public transport good for public welfare or for the public interest. The purpose of this study was to determine the role of Belfast City Transport Department in the implementation of mass public transport system that is focused on the implementation of BRT Trans Bandar Lampung in Bandar Lampung, in addition to the factors inhibiting the implementation of mass public transit system effective at the Belfast City holding of Bus Rapid Transit (BRT) Trans Bandar Lampung. Factors inhibiting the implementation of mass public transport system is effective in the city of Bandar Lampung with the holding of Bus Rapid Transit (BRT) Trans Belfast is a push-pull by the designated companies in the construction of BRT stops, infrastructure and transport facilities are very minimal and there are many transportation facilities were damaged and the comparison between the ability to increase the rate of road motor vehicles in the city of Bandar Lampung look unbalanced.

Advice to relevant parties in the process of structuring public transportasi land in Bandar Lampung as follows: It is recommended that the city government of Bandar Lampung may consider re-collaboration with the CV Devis Jaya in the construction of shalte and opens greater opportunities to other parties, other than that to review the policy to permit the construction of shalte on sidewalk which by law is pedestrian rights . the city governmeSnt of Bandar Lampung to make the division line of the road or

public transport to be different from the path traversed by the Trans Bus Bandar Lampung, thereby reducing the accumulation of vehicles in those lanes that lead to congestion. The Government should immediately issue a policy to limit the number of private vehicles continues to increase, as well as providing socialization routed and switched so that users prefer to use public transport in the implementation of activities.